**PERAN MAHASISWA DALAM PELAKSANAAN POLITIK DAN
STRATEGI NASIONAL**

Disusun Oleh :

NAMA : YOSEPH YERMIAS PATTY

NIM : 20173506116

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN 2017/2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, tugas Pendidikan Kewarganegaraan dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “PERAN MAHASISWA DALAM PELAKSANAAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL”.

Tujuan penyusunan makalah Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir. Makalah ini disusun berdasarkan referensi-referensi dari berbagai sumber.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing kami dalam mengerjakan makalah ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman mahasiswa yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Sorong, 19 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Permasalahan	3
BAB III Pembahasan	
1. Peran Mahasiswa dalam Perkembangan Politik dan Strategi Nasional	8
2. Paradigma Mahasiswa mengenai Sistem Politik di Indonesia dalam Kaitannya dengan Demokrasi	15
3. Tindakan Mahasiswa Dalam Mengatasi Masalah Politik dan Strategi Nasional pada dewasa ini	18
BAB III Penutup	
A. Kesimpulan	23
B. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	iv
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional, sedangkan strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan, sistem pemerintahan dan politik

Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden.

Untuk itu peran mahasiswa dalam hal ini sangat diperlukan. Karena Mahasiswa merupakan bagian masyarakat yang memiliki peranan penting dalam menggulingkan sebuah kekuasaan dan menggantinya dengan sebuah tonggak baru, yang mengedepankan demokrasi. Dalam peran Mahasiswa memiliki sikap kritis yaitu sebagai *agen of changes* dan *agen of control social*. Sebagai *agen of changes* gerakan mahasiswa masih dipercaya oleh masyarakat mampu membawa perubahan. Hal ini dikarenakan pergerakan mahasiswa masih diisi oleh nilai-nilai kaum muda yang identik dengan gerakan moral yang bertumpuh pada empati dan simpati terhadap lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, menumbuhkan semangat keberpihakan pada rakyat, serta menjadi jembatan bagi dunia akademik dan

masyarakat. Gerakan mahasiswa merupakan gerakan murni kepedulian yang penuh dengan analisis intelektual untuk perubahan.

Peran Mahasiswa sebagai *social control* terjadi ketika ada hal yang ganjil di dalam masyarakat. Gagasan, pendapat, serta ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa sangat berperan aktif dalam menjaga, memperbaiki dan menjadikan nilai dan norma didalam masyarakat kembali stabil dan bisa dikendalikan kembali.

Selain itu, Mahasiswa juga harus menumbuhkan jiwa kepedulian sosial yang peduli terhadap masyarakat lain. Hal ini dapat diwujudkan ketika pemerintah memberikan kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat.

Mahasiswa berpartisipasi dalam politik secara konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kampanye, bergabung dengan interest group, serta komunikasi dengan elite politik. Ada pula partisipasi Mahasiswa dalam bentuk nonkonvensional yakni bentuk partisipasi yang tidak normal, diantaranya yaitu ada yang legal, nonlegal, keras dan revolusioner, seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, aksi mogok, kekerasan politik dan revolusi.

Kebanyakan Mahasiswa memandang politik adalah hal yang negatif. Tetapi bukan hanya Mahasiswa saja, melainkan dikalangan lainnya masyarakat juga menganggap politik merupakan hal yang negatif. Jika mahasiswa dan masyarakat lebih mengenal jauh tentang politik, maka tidak ada kesalahpahaman terhadap politik tersebut.

Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan membahas lebih luas di pembahasan tentang “Peran Mahasiswa dalam Pelaksanaan Politik dan Strategi Nasional”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat kami simpulkan beberapa rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan. Adapun rumusan masalah yang kami angkat, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Mahasiswa dalam Perkembangan Politik dan Strategi Nasional di Indonesia?
2. Sejauh manakah Paradigma Mahasiswa mengenai Sistem Politik Indonesia dalam kaitannya dengan Demokrasi?
3. Apa saja tindakan Mahasiswa dalam mengatasi masalah Politik dan Strategi Nasional pada dewasa ini?

BAB II

PEMBAHASAN

Sebelum penulis menguraikan pembahasan dalam penulisan makalah ini, terlebih dahulu penulis menyajikan beberapa pengertian pokok mengenai Politik dan Strategi Nasional sebagai berikut :

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia*, yang akar katanya adalah *polis*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan *teia*, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. *Politics* dan *policy* memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. *Politics* memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan *policy* memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-sebaiknya.

Dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan *policy*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Beberapa definisi politik menurut para ahli:

1. Ramlan Surbakti (1999:1)

Bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

2. Kartini Kartono (1996:64)

Bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

3. Rod Hague

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

4. Litre

Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara.

5. Mirriam Budiarjo

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dari suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

6. Sri Sumantri

Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

7. Aristoteles

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah segala urusan dan tindakan yang menyangkut kesatuan masyarakat atau

kepentingan umum serta rangkaian asas-asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat-alat yang bertujuan untuk mencapai suatu cita-cita atau suatu tujuan tertentu.

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang diartikan sebagai “*the art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

Definisi-definisi menurut para ahli antara lain:

1. Karl Von Clausewitz

Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

2. A. Halim

Strategi adalah suatu cara dimana organisasi / lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang - peluang dan ancaman - ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal

3. Kaplan & Norton

Strategi adalah seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect, yaitu suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara pernyataan *if-then*.

4. Stephanie K. Marrus

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

5. Hamel & Prahalad (1995)

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus - menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

6. Sjahfrizal

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olah raga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan.

Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Pada era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden.

1. Peran Mahasiswa dalam Sejarah Perkembangan Politik dan Strategi Nasional di Indonesia

Dilihat kembali dalam sejarah di Indonesia, dasar perubahan khususnya pada dunia politik hampir selalu dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa terbukti mampu menjadi pelopor dalam sejarah Bangsa. Mahasiswa merupakan bagian dari rakyat, bahkan ia merupakan rakyat itu sendiri. Mahasiswa sebagai tumpuan berbagai pihak. Mereka sering disebut sebagai harapan bangsa, harapan negara, harapan masyarakat, harapan keluarga bahkan harapan dunia. Mahasiswa sebagai agen perubahan (*Agen of Change*) seringkali menjadi pemicu dan pemacu perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Secara empiris, dalam sejarah Indonesia mahasiswa telah membuktikan dirinya sebagai agen perubahan sejarah. Seperti yang diketahui mahasiswa sangat berperan penting sebagai kekuatan dan subjek sejarah dalam perkembangan reformasi di Indonesia. Kekuatan itu sungguh ada dan bentuknya yang paling nyata adalah gerakan mahasiswa yang tidak kunjung henti-hentinya pada akhir ini.

1.1 Pra Kemerdekaan Hingga Kemerdekaan

Mahasiswa Indonesia telah berperan dalam menciptakan perubahan sebelum kemerdekaan NKRI. Sejak tahun 1908 dengan berdirinya Boedi Oetomo, mahasiswa Indonesia mulai mengadakan persatuan untuk mendiskusikan dan memperjuangkan nasionalisme bangsa Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, gerakan mahasiswa mengalami persatuan, namun di Belanda juga. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar disana mendirikan organisasi-organisasi pemuda Indonesia, seperti Indoneische Vereeniging, Indische Partij, Indische Sociaal democratische (ISDV) dan lainnya. Dari kebangkitan pemuda yang dimotori mahasiswa tersebutlah, maka pada tanggal 28 Oktober 1928 pada kongres pemuda II, maka dicetuskanlah “Sumpah Pemuda”. Ikrar yang menjadikan seluruh pemuda di Indonesia mengakui bahwa hanya ada satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan tersebutlah, mahasiswa-mahasiswa Indonesia telah mengadakan sebuah gerakan persatuan, untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Nasib bangsa yang belum lahir, namun akan segera lahir. Gerakan mahasiswa ini berperan untuk mendiskusikan dan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia yang saat itu sedang dijajah oleh Belanda. Gerakan mahasiswa inilah yang kemudian berpikir akan persatuan seluruh bangsa Indonesia untuk mendapatkan haknya untuk merdeka dan menjadi masyarakat yang adil, sejahtera dan beradab. Mahasiswa di Belanda maupun di Jakarta, terus mendiskusikan dan bermimpi tentang kemerdekaan rakyatnya.

Setelah peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan pergerakan bawah tanah yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia, dan dibantu juga oleh beberapa orang Belanda yang prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia. Maka pada tahun 1945, pada saat Jepang berkuasa, maka Pemuda Indonesia yakni terdiri dari angkatan muda dan angkatan tua berupaya untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada bulan Agustus, angkatan muda yang dipelopori oleh Chaerul Saleh dan Soekarni menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, dan berita tersebut diteruskan keseluruh Indonesia.

Gerakan pemuda Indonesia yang didalamnya merupakan gerakan mahasiswa, lewat diskusi-diskusi bawah tanah di Asrama Menteng, Asrama Cikini dan Asrama Kebon Sirih, berhasil membawa perubahan pada bangsa Indonesia, sehingga menemukan kemerdekaannya sendiri. Peran gerakan pemuda tidak habis oleh waktu. Sejak tahun 1908, 1928 hingga 1945, pemuda tetap berkobar dengan pemikirannya yang berani dan kritis untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Memang waktu yang panjang untuk menemukan sebuah kemerdekaan, namun dengan strategi gerakan yang tepat bangsa ini telah menemukan nasibnya sendiri. Ditangan gerakan pemuda nasib bangsa ini berubah, dan ditangan pemuda jugalah perubahan terjadi.

1.2 Masa Pasca Kemerdekaan dan Orde Lama

Kemerdekaan telah diraih, perubahan telah terjadi. Dimanakah pemuda-pemuda Indonesia setelah kemerdekaan? Mereka tetap ada dalam titik kritis dengan pemerintahan yang baru saja terbentuk. Masukan-masukan kritis diberikan para pemuda kepada Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan nasib bangsa Ini. Pemuda-pemuda generasi tua seperti Soekarno, Hatta, Amir Syarifudin dan lainnya masuk dalam tubuh

pemerintahan baru untuk meneruskan perjuangan pemuda Indonesia, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan beradab.

Pada tahun-tahun selanjutnya mulai muncul pergerakan-pergerakan mahasiswa yang berlandaskan nasionalisme Indonesia, untuk tetap berjuang menuju kemerdekaan yang dicita-citakan. Seperti PMII, GMNI, HMI dan lainnya. Pada tahun 1950 hingga 1959, saat Indonesia menerapkan demokrasi liberal, yang memunculkan banyak partai politik. Maka beberapa gerakan mahasiswa dan pemuda, dibawah kearah perjuangan partai politik, seperti GMNI dengan PNI, PMII dengan partai NU, HMI dengan Marsyumi dan gerakan lainnya yang mulai berdekatan dengan partai. Dengan demikian peran mahasiswa masuk kedalam ranah politik.

Pada tahun 1966, ketika PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) terbentuk (25 Oktober 1966), dengan tujuan agar aktivis mahasiswa dapat lebih terkoordinasi dalam melawan PKI dan memiliki kepemimpinan. Adapun organisasi yang terbentuk dalam KAMI, yakni HMI, PII, GMKI, Sekretariat Bersama Organisasi-Organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila, Ikatan Pers mahasiswa Indonesia (IPMI). Munculnya KAMI diikuti dengan munculnya kesatuan aksi lainnya. KAMI dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung MPR/DPR RI untuk menuntut TRITURA, yakni bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet DWIKORA, dan turunkan harga serta perbaikan sandang pangan. Peran gerakan mahasiswa telah diperlebar dari memperjuangkan kemerdekaan, menjadi mempertahankan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Mahasiswa tetap mengawal kemerdekaan yang telah mereka capai.

Pada tahun 1966 juga, saat presiden Soekarno menetapkan sistem presidensial. Gerakan mahasiswa di Indonesia mulai terlibat untuk memperjuangkan sebuah orde yang baru. Mahasiswa-mahasiswa saat itu,

seperti akbar tanjung. Cosmas batubara, Sofyan wanandi dan lainnya (angkatan 66) memperjuangkan sebuah sistem demokrasi yang baru, yang mengganti sistem presidensial. Selain itu mereka juga berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI. Setelah perjuangan mahasiswa dan TNI berhasil berhasil menumpas PKI, maka Indonesia memasuki sebuah orde baru, yang mana mahasiswa semakin bersahabat dengan TNI. Sebuah orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto.

Apakah setelah itu pergerakan mahasiswa selesai ? Belum. Ada beberapa mahasiswa seperti Akbar Tanjung, Cosmas Batubara dan lainnya diberikan hadiah oleh presiden Soeharto untuk masuk dalam kabinet menteri Orde Baru. Sedangkan mahasiswa lainnya kembali masuk ke kampus dan menempatkan jarak kritis dengan pemerintah. Pada tahun 1971, ketika pemerintahan Orde Baru berupaya mempertahankan posisi pemerintahannya dengan membuat 2 undang-undang yang secara politis menguntungkan status quo mereka (baik UU tentang Pemilu, Partai politik maupun MPR, DPR, DPRD). Maka mulai muncul suatu gerakan dalam bentuk pernyataan sikap ketidakpercayaan dari masyarakat, yang dimotori oleh mahasiswa. Mahasiswa yang saat itu dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution, Arif Budiman dan Asmara Nababan menawarkan golongan Putih (Golput), sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang membatasi partai dan mempolitisir kemenangan pemilu (pada Golkar). Selanjutnya pada tahun 1972 hingga tahun 1974, ketika terjadi banyak korupsi di tubuh pemerintahan dan masyarakat mengalami kemiskinan, akibat naiknya harga beras, maka mahasiswa bergerak ke jalan-jalan untuk melakukan demonstrasi penurunan harga dan pembubaran Asisten Pribadi. Pada tahun 1974 dan 1975 terjadi peristiwa Malari yang juga dimotori oleh mahasiswa lewat demonstrasi besar. Namun demonstrasi besar tersebut berubah menjadi suatu kerusuhan sosial besar, hingga penjarahan yang memakan banyak

korban. Hal ini dikarenakan demonstrasi telah disusupi oleh orang-orang (Soeharto) yang ingin memanfaatkan gerakan mahasiswa tersebut.

Menjelang Pemilu tahun 1977, pergerakan mahasiswa mengangkat isu berbagai penyimpangan politik. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak demokratis. Pada saat ini pemerintah juga membentuk tim kampanye untuk masuk ke kampus-kampus, namun tim ini ditolak oleh mahasiswa. Setelah itu pergerakan mahasiswa berkonsentrasi didalam kampus (karena menghindari kejadian seperti peristiwa Malari). Hingga tahun 1978, mahasiswa tetap bergerak dari dalam kampus, sehingga memaksa militer masuk kedalam kampus, dan dihapusnya Dewan mahasiswa (diganti dengan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) / Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) secara paksa oleh pemerintah diseluruh Indonesia.

Setelah tahun 1974 (sejak dibentuknya NKK dan BKK) maka tidak ada gerakan besar yang dilakukan oleh mahasiswa intra. Dalam perkembangannya gerakan mahasiswa digeser oleh kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi alternatif gerakan mahasiswa, untuk membantu masyarakat mencapai tujuannya. Selain itu beberapa mahasiswa intra mulai meleburkan diri dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, seperti HMI, PMII, GMKI dan PMKRI (yang selanjutnya dikenal dengan kelompok Cipayung). Kelompok Cipayung ini terus melakukan pergerakan lewat diskusi-diskusi dan pers mahasiswa.

Pada tahun 1990 NKK dan BKK dicabut, dan Senat Mahasiswa Perguruan tinggi (SM-PT) diakui kembali oleh Menteri Pendidikan & Kebudayaan (waktu itu Fuad Hasan). Namun hal ini juga mendapat reaksi keras dari mahasiswa, karena dianggap ada agenda tersembunyi dari pemerintah, yakni ingin kembali mengajak mahasiswa kedalam kampus, dan memotong aliansi mereka yang ada diluar. Mahasiswa menuntut organisasi kampus yang mandiri dan bebas dari politisasi

antara birokrasi dengan pihak kampus. Gerakan mahasiswa pada tahun 1990-an menuntut kebebasan mimbar akademik. Setelah bersatunya seluruh element mahasiswa, setelah sebelumnya dibungkam oleh pemerintah lewat NKK/ BKK. Mahasiswa kembali menyuarakan suaranya.

Pada tahun 1998, gerakan mahasiswa menuntut reformasi dan menenggalkan Orde Baru yang telah melakukan banyak KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Lewat pendudukan gedung DPR/MPR, akhirnya mahasiswa berhasil memaksa presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Dan saat itu bangsa Indonesia memasuki sebuah era baru yaitu era reformasi.

1.3 Era Reformasi

Setelah Orde Baru diruntuhkan oleh mahasiswa, maka reformasi tercipta. Keterbukaan dan kebebasan yang selama ini ditindas menjadi terbuka. Setelah demonstrasi besar untuk masuk ke era reformasi, gerakan mahasiswa kembali ke kampus. Lalu siapakah orang kepercayaan mahasiswa untuk melanjutkan pemerintahan? Yang melanjutkan pemerintahan adalah wakil presiden, yakni Habibie. Namun pada saat itu pemerintahan juga didukung tokoh-tokoh reformasi yang dimandatkan mahasiswa, seperti Megawati Soekarnoputri, Gus Dur, Amin Rais dan Sultan Hamengku Buwono X. Gerakan mahasiswa menciptakan awal perubahan reformasi, berhasil. namun masih ada pekerjaan rumah hingga saat ini untuk mewujudkan cita-cita reformasi.

Pasca reformasi, tokoh-tokoh reformasi bersaing lewat dunia politik untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Dan beberapa tokoh reformasi, seperti Megawati Soekarnoputri dan Gus Dur berhasil menjadi Presiden Republaik Indonesia (Gus Dur Presiden RI ke-4 & Megawati Soekarnoputri Presiden Ri ke-5), sedangkan Amin Rais menjadi ketua MPR RI pada tahun 1999. Gerakan mahasiswa dan tokoh-tokoh mahasiswa berupaya untuk terus mewujudkan reformasi di Indonesia.

Beberapa keberhasilan proses reformasi yakni Pemilu 1999 yang diikuti oleh banyak partai, kebebasan pers dan media, kebebasan umat beragama (Konghuchu masuk menjadi salah satu agama di Indonesia), pemisahan POLRI dan TNI, TNI kembali ke barak, reformasi POLRI (polisi sipil), upaya penumpasan KKN dan banyak UU direvisi menjadi pro-rakyat. Proses menuju cita-cita reformasi terus berlanjut hingga kepemimpinan presiden saat ini, dan belum tuntas.

Era reformasi mahasiswa mengambil peran sangat besar, sejak awal terjadinya perubahan, hingga pengawalan terhadap perubahan dalam masyarakat akibat reformasi. Gerakan mahasiswa masih tetap berpikir kritis dan memberikan pernyataan sikap terhadap kinerja pemerintah, serta kebijakan-kebijakan. Saat ini peran mahasiswa untuk terus mengawal reformasi masih berjalan.

2. Paradigma Mahasiswa Mengenai Sistem Politik Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Demokrasi

Mahasiswa merupakan tiruan miniatur masyarakat intelektual yang memiliki corak keberagaman pemikiran, gagasan dan ide-ide yang penuh dengan kreativitas. Dengan sifat keintelektual dan idealismenya mahasiswa lahir dan tumbuh menjadi entitas (model) yang memiliki paradigma ilmiah dalam memandang persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan. Ciri dan gaya mahasiswa terletak pada ide atau gagasan yang luhur dalam menawarkan solusi atas persoalan-persoalan yang ada.

Gerakan mahasiswa saat ini diwujudkan dalam menanggapi setiap upaya depolitisasi yang dilakukan Pemerintah/Penguasa. Terutama, ketika maraknya Korupsi, ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap hak-hak rakyat. Mahasiswa berperan sebagai perpanjangan aspirasi rakyat, gerakan mahasiswa lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas kepeduliannya terhadap lingkungannya serta agar dapat berbuat lebih banyak bagi perbaikan kualitas hidup bangsa. Jadi, gerakan yang dilakukan

mahasiswa berupa koreksi atau kontrol atas kejadian politik yang melenceng dan merugikan rakyat.

Menurut Dr. Mohtar Mas'ood, secara fungsi, mahasiswa mempunyai dua peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, mahasiswa sebagai manager dan kedua mahasiswa sebagai pencetus gagasan. Peran yang pertama lebih berorientasi pada tindakan, yaitu lebih menekankan masalah "how to get things done" sehingga peran ini lebih memerlukan bekal keilmuan yang menunjang penyelesaian masalah dalam suatu bidang ilmu-ilmu manajemen yang bersifat teknokrasi. Dan peran kedua lebih berorientasi pada kegiatan pemikiran, yaitu lebih pada kerja "asah otak" untuk melahirkan kemungkinan alternatif sehingga dalam prakteknya peran ini lebih memerlukan bekal keilmuan yang mengutamakan kontemplasi.

Dewasa ini, kesadaran berpolitik mahasiswa mulai memudar. Hal itu terjadi karena kultur modernisasi dan globalisasi yang cenderung mengikis idealisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Mahasiswa perlu memiliki kesadaran politik dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di sekitarnya.

Aktivitas pergerakan mahasiswa seperti demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang notabene sebagai sarana komunikasi politik dalam bentuk lisan maupun tulisan kini lebih ke arah kekerasan dan tidak menonjolkan inti dari aspirasi yang disampaikan bahkan kadang mementingkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu.

Kehidupan politik mahasiswa dapat dicontohkan dalam dunia organisasi kemahasiswaan. Dalam dunia organisasi, mahasiswa dapat berlatih untuk berpolitik dan berperan secara langsung. Dalam dunia organisasi mahasiswa bisa tahu kejadian-kejadian politik di lingkungannya masing-masing, tahu bagaimana cara berkomunikasi dan berargumen dengan baik dan benar di depan umum, tahu bagaimana cara menyampaikan pendapat, gagasan maupun aspirasi. Hal-hal tersebut yang nantinya dapat berguna untuk kehidupan berpolitik dan bermasyarakat. Namun minat dan antusiasme mahasiswa untuk masuk dalam dunia organisasi mulai rendah, berbagai

alasan muncul mulai dari kesibukan di luar perkuliahan yang tidak memungkinkan untuk ikut organisasi maupun kesadaran politik dan sikap acuh tak acuh dengan dunia politik dan organisasi. Hal tersebut muncul karena kekecewaan akan keadaan politik di Indonesia yang carut marut kasus korupsi yang kian banyak dan tak terkendali. Ketidakberdayaan mahasiswa atau pemuda untuk melakukan perubahan malah membuat sikap acuh terhadap pemerintah. Imbasnya fungsi kontrol terhadap kebijakan yang merugikan rakyat tidak berjalan dengan baik ditambah lagi tanpa disadari perilaku elit politik telah berimbas pada dunia akademik mahasiswa. Perjuangan mahasiswa terhadap organisasinya masing-masing hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

Dengan kesadaran dan keikhlasan untuk memberdayakan masyarakat dan berusaha menguatkan masyarakat dengan memberikan penyadaran politik dan membangun nalar publik, dengan menanamkan pemahaman atas hak dan kewajiban di dalam berbangsa dan bernegara. Sikap mental demikian yang seharusnya dimiliki bukan hanya mahasiswa akan tetapi para elit politik maupun masyarakat sendiri agar pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik. Perbaikan akhlak dan ilmu pengetahuan di semua pihak harus dilaksanakan karena politik tanpa moralitas dapat menjadi sesuatu yang merugikan untuk semua baik di masa kini maupun masa mendatang dan sebaliknya moralitas tanpa kesadaran berpolitik berbangsa dan bernegara akan menjadikan tatanan hidup tidak berjalan secara optimal. Baik elit politik maupun para mahasiswa wajib mengedepankan etika moral berpolitik apalagi dalam berbangsa dan bernegara.

Kasantunan, kedewasaan, dan keluhuran budi dalam berpolitik merupakan keniscayaan dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Bangsa yang beradab bukan bangsa yang memiliki sejarah yang baik akan tetapi memiliki kemampuan untuk menjalankan kehidupannya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya termasuk berpolitik yang baik dan berkonotasi untuk kemajuan bangsa bukan untuk pribadi ataupun golongan tertentu.

3. Tindakan Mahasiswa Dalam Mengatasi Masalah Politik Pada Dewasa Ini

Dewasa ini, hampir setiap permasalahan, mahasiswa sering mengedepankan fisik dalam upaya menyelesaikan masalah bukan dengan otak. Pada kenyataannya, seolah menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan mahasiswa ketika melakukan aksi demonstrasi. Misalnya saja, demonstrasi menentang kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Hampir dalam setiap aksinya mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Tentunya tindakan ini sangat disayangkan, karena mahasiswa adalah kaum intelektual, yaitu kaum yang selalu menggunakan otaknya dalam setiap mengatasi permasalahan. Sebenarnya, tindakan anarkis yang dilakukan mahasiswa disebabkan oleh adanya ketidakpuasan mereka terhadap hal tertentu.

Melihat realita yang terjadi saat ini di kalangan perguruan tinggi, mayoritas mahasiswa di era modern ini masih belum mampu memahami identitas sosialnya. Mahasiswa merupakan para intelektual muda yang dapat menjadi agent of change dalam suatu bangsa. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam segala lini kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, tak pernah lepas dari kontrol mahasiswa. Problematika bangsa, dari politik, ekonomi, sosial, sampai agama adalah lahan perjuangan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Namun di era modern saat ini mungkin gambaran mengenai mahasiswa yang idealis dan anti pragmatis hanya dapat kita sambangi pada mahasiswa era reformasi. Kala itu kepiawaian dan kelihaian mahasiswa dalam menebar angin perubahan kepada masyarakat Indonesia terbukti telah tumbuhnya benih reformasi 1998.

Kini, mata kita disuguhi dengan realitas yang berbanding terbalik dengan masa-masa sebelumnya. Jika dulunya mahasiswa terlihat garang terhadap birokrasi dan pernah menjadi momok menakutkan bagi aparat birokrasi yang berkuasa saat itu, maka justru sekarang mahasiswa cenderung bersikap jinak dan terlihat terkadang mahasiswa itu rela berkompromi demi keuntungan sesaat. Maka jangan heran kalau mahasiswa saat ini dijuluki sebagai hamba setia birokrasi. Semua berdasarkan fakta yang terjadi saat ini. ketika terjadi

demonstrasi, mahasiswa terkadang merusak sejumlah fasilitas publik dan ratusan orang kehilangan waktu gara-gara lalu lintas macet. Apakah aksi itu sesuai dengan aspirasi rakyat? tentu tidak. Banyak masyarakat antipati dengan munculnya aksi-aksi mahasiswa. Mereka sepertinya kurang simpati, karena aksi mahasiswa tidak lebih dari sekedar sumber kemacetan lalu lintas. Masyarakat sudah mulai kritis terhadap aksi mahasiswa. Sehingga masyarakat tidak tertarik bergabung dengan demonstrasi mahasiswa .

Sikap idealisme yang tidak tertawar yang dimiliki mahasiswa itu seharusnya dijaga. Tapi bagi sebagian besar mahasiswa sekarang, sudah mulai dipersepsi sebagai ‘emas murni’ yang terlihat seksi dan pantas untuk dijual kesana-kemari. Baju kebanggaan itu kini perlahan telah ditanggalkan lalu digantikan dengan kostum pragmatism material karena dianggap lebih memikat dan dapat mendatangkan keuntungan dalam jumlah materi yang besar. Dan parahnya, beberapa bulan belakangan ini di media massa, baik cetak maupun elektronik dihiasi pemberitaan mengenai tawuran para calon intelektual muda yaitu mahasiswa. Tentu semua merasa prihatin dengan aksi tawuran yang sering terjadi dalam dunia kampus. Seharusnya seorang mahasiswa masuk ke suatu universitas untuk menimba ilmu, bukan malah menjadi preman.

Kondisi mental dari mahasiswa kita memang sudah merosot dan mengkhawatirkan, sehingga perlu dicari jalan keluar agar bangsa ini tidak kehilangan generasi penerus bangsanya. Sudah seharusnya mereka berada dalam hal pemikiran intelektual, kreativitas, dan pengabdian kepada masyarakat bukan sebaliknya. Peran serta dalam menyumbangkan ide dan tenaga dalam mengubah kondisi sosial pun seharusnya jadi kewajiban bagi mahasiswa. Jangan ikut-ikutan tanpa mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi.

Keberadaan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan politik dalam konteks bernegara/bangsa merupakan fenomena universal. Beberapa negara, hampir setiap perubahan sosial besar yang terkait dengan kekuasaan, selalu melibatkan peran mahasiswa. Begitu pula dengan pengalaman sejarah

mahasiswa di Indonesia, peran mahasiswa sebagai kekuatan politik sangat dirasakan.

Dapat dikatakan, mahasiswa menjadi salah satu inisiator atau agen dalam mendiskusikan ide/ideologi gerakan-gerakan sebelum dan setelah kemerdekaan serta zaman Reformasi di Republik Indonesia. Mahasiswa merupakan bagian dari kelompok bermasyarakat/sosial yang secara khusus mendapat kesempatan mengikuti proses pendidikan formal di bangku kuliah perguruan tinggi. Potensi bekal pengetahuan yang diterima lewat bangku kuliah atau pendidikan tinggi, menyebabkan mahasiswa kerap dianggap sebagai salah satu segmen/bagian penting dalam kelompok sosial masyarakat. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa mahasiswa sebagai kelompok terpelajar intelektual atau kelompok strategis. Persepsi ini timbul dikarenakan kesadaran akan kritik mahasiswa terhadap kinerja kekuasaan dan lingkungan sosialnya. Persepsi semacam ini dalam kurun waktu terdahulu menemukan basis empirisnya, yaitu peran heroik mahasiswa dalam tiap segmen perubahan sosial dan politik penting sejarah negara-berbangsa, termasuk sejarah panjang perjuangan Bangsa Indonesia.

Peran heroik mahasiswa itu cenderung gegap gempita dalam struktur kepolitikan negara-bangsa otoriter. Karena dalam struktur kepolitikan yang otoriter itu mahasiswa menemukan musuh bersama yaitu penguasa otoriter yang jadi pengikat kesatuan kekuatan mahasiswa. Sebaliknya, peran heroik mahasiswa saat ini cenderung memudar, fluktuatif dan sepi dalam struktur kepolitikan negara-bangsa yang demokratis. Sebab, struktur kepolitikan demokratis niscaya berkepentingan mengakomodasi pelibatan kekuatan sosial secara inklusif, termasuk mahasiswa. Sehingga, gaung peran heroik mahasiswa itu tak mencuat ke permukaan, tetapi terlembaga dalam struktur politik negara-bangsa.

Selalu ada konteks lingkungan yang melingkupi gagasan dan kegiatan mahasiswa dimana dan kapanpun. Salah satu kerangka pemikiran yang dapat dipakai untuk menjelaskan realitas interaksional antara mahasiswa dengan lingkungannya adalah perspektif ekonomisme dan perspektif politisisme.

Benang merah perspektif ekonomisme dan perspektif politisisme adalah fokus pada preferensi dan kepentingan bersama, bukan individu. Sehingga, dalam kerangka keberadaannya, mahasiswa dipahami sebagai komunitas yang memiliki nilai bersama (share values), bukan dipahami sebagai individu-individu mahasiswa yang memiliki nilai berfragmentasi (fragmented values). Perspektif ekonomisme mengasumsikan proses-proses politik adalah hasil dari interaksi antarkekuatan sosial yang ada dimasyarakat. Sedangkan perspektif politisisme mengasumsikan negara/pemerintah adalah juga merupakan salah satu kekuatan social yang terlibat dalam proses interaksi dengan kekuatan social yang lain. Mahasiswa tak mungkin terlepas dari politik. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mahasiswa akan selalu dilingkupi oleh politik. Interaksi mahasiswa dengan politik dapat bersifat tiga arah, yaitu, mempengaruhi, dipengaruhi, atau saling mempengaruhi. Hingga abab 20-an, politik cenderung dilekatkan dengan konotasi idea tau ideologi. Mahasiswa sebagai salah satu kekuatan social dalam masyarakat pun terlibat aktif dalam pergumulan ide/ideologi dunia tersebut. Memasuki abab 21 hingga sekarang, konotasi politik cenderung bergeser dari sekedar ide/ideologi menjadi kehadiran/representasi.

Disamping itu, berkembang keyakinan bahwa perubahan tidak mungkin terjadi hanya dengan gagasan, tetapi harus dengan pelibatan diri dalam kelembagaan politik, maka jejaring ekonomi politik niscaya menjadi persyaratan. Itu sebabnya, semua kekuatan sosial yang ada di masyarakat termasuk mahasiswa, berkepentingan membangun jejaring dengan partai politik, ormas, political executive, organisasi ekstra kampus, organisasi intra kampus, LSM, kekuatan kapital bahkan kekuatan global. Semakin luas jejaring ekonomi politik yang dimiliki, maka semakin besar peluang dilibatkan dalam kelembagaan politik. Sebaliknya, semakin sempit jejaring ekonomi politiknya, maka semakin besar peluang tersingkir dari kelembagaan politik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di bab sebelumnya, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Peran mahasiswa dalam pelaksanaan politik dan strategi nasional sangat dibutuhkan, dikarenakan mahasiswa merupakan kaum intelektual muda yang memiliki pemikiran kritis terhadap segala masalah-masalah politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Dari era kemerdekaan hingga era reformasi, mahasiswa sangat berperan dalam segala perubahannya. Mereka yang menggulingkan orde lama dan melahirkan orde baru.
2. Dengan sifat keintelektual dan idealismenya mahasiswa lahir dan tumbuh menjadi entitas (model) yang memiliki paradigma ilmiah dalam memandang persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan. Ketika maraknya Korupsi, ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap hak-hak rakyat, mahasiswa turut serta dalam menanggapi setiap masalah tersebut.
3. Dalam dewasa ini, kenyataannya banyak mahasiswa yang bertindak tanpa memahami lebih dalam apa itu politik dan strategi nasional. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak mahasiswa yang sudah turut berperan dalam dunia politik, tetapi tindakan-tindakan mahasiswa tersebut tidak menggambarkan sikap dan perilakunya sesuai dengan identitas sosialnya.

B. Saran

1. Mahasiswa sebaiknya harus lebih aktif dalam mengambil sebuah keputusan serta berperan untuk membantu masyarakat lainnya yang kurang memahami tentang politik dan strategi nasional.
2. Sebaiknya mahasiswa itu harus lebih berinisiatif dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Karena dengan memiliki intelektual lebih tinggi, mahasiswa mampu berpikir yang

lebih kritis dalam mengambil sebuah keputusan serta mahasiswa banyak memiliki pemikiran, dan ide-ide yang kreatif.

3. Diharapkan bukan hanya mahasiswa yang berperan aktif dalam politik melainkan masyarakat pun juga harus berperan aktif dalam politik dan strategi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Purnomo, A. (2018). PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *JURNAL NOKEN: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 11-26.

Purnomo, A. (2018). STUDI KUANTITATIF: BIAYA TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *JURNAL NOKEN: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21-30.

Sindhunata, 2000. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius.

Sutoyo, 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Darmadi, Hamid, 2013. *Urgensi Pendidikan dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta.

Ubaedillah, A dan Rozak, Abdul. *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soetrisno, Loekman, 1997. *Demokratisasi Ekonomi & Pertumbuhan Politik*, Yogyakarta: Kanisius

Agustino, Leo, 2009. *Politik & Perubahan antara Reformasi Politik di Indonesia dan Politik di Malaysia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muluk, Hamdi, 2010. *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<http://rickyanggili.blogspot.com/2011/06/peran-gerakan-mahasiswa-dalam-perubahan.html>

<http://087828150515.blogspot.com/2011/09/peranan-mahasiswa-dan-pergerakan.html>

<http://kampus.okezone.com/read/2010/11/15/95/393302/redirect>

http://tehjeruk.blogspot.com/2012/08/peran-mahasiswa-sebagai-agen-of-change_17.html